

**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2025**

JALAN PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS, SH – KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang atas ridho-Nya, **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** dapat merumuskan dan menyusun **LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2025**. Penyusunan **Laporan Kinerja (LKj)** ini sangat diperlukan untuk sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan lebih memantapkan pelaksanaan **Akuntabilitas** sebagai perwujudan **Good Government**.

Pelaporan KINERJA merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk dari Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** atas penggunaan anggaran, yang mana SAKIP itu sendiri diperlukan untuk pengukuran hasil dan capaian kinerja pelayanan OPD.

Tersusunnya **LKj** ini diharapkan akan terciptanya keterbukaan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan** dan **Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semoga **Laporan Kinerja (LKj)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya mewujudkan **Good Government**.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. RIDUWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19740306 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.3. Susunan Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Peternakan	5
1.5. Isu – isu Strategis	9
1.6. Maksud dan Tujuan	11
1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (2021-2026)	13
2.2. Indikator Kinerja Utama	22
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025	24
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	38
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	41
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran dan Rekomendasi	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik..

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai sub sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah , melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna , bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini merupakan salah satu dari wujud akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran serta target yang telah ditetapkan.

Terkait dengan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021- 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perkebunan dan Peternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan, pengolahan dan pemasaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

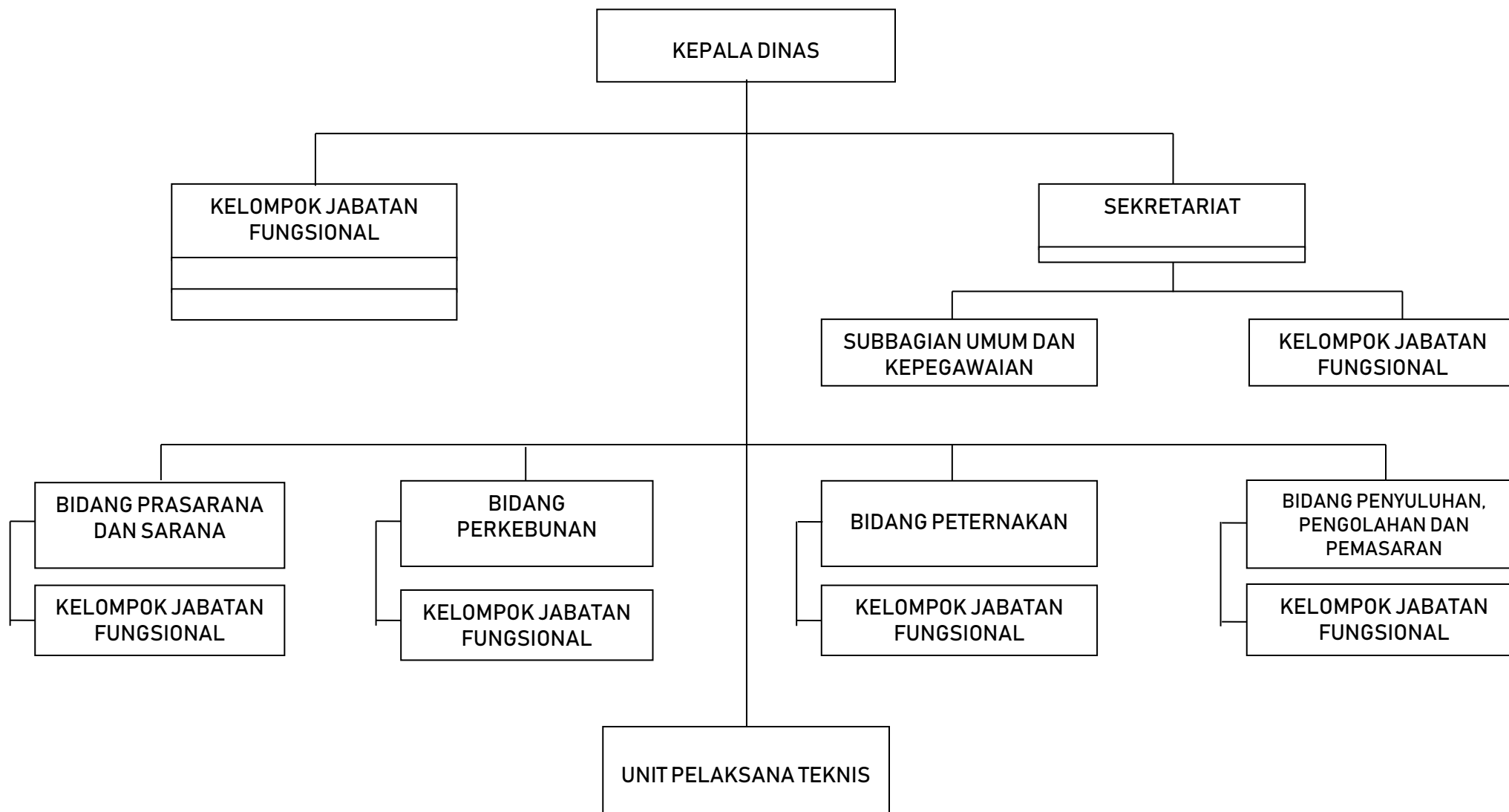
1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Peternakan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.
 1. UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan

Secara lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar dibawah berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



1.4. SUMBER DAYA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah mencakup sumber daya aparatur, sarana prasarana yang dimiliki serta asset lainnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melibatkan unsur aparatur dengan jumlah, status dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel – tabel berikut ini:

Tabel 1.4.1.1. : Jumlah Pegawai ASN, PPPK dan PPPK PW Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	7
2.	III	22
3.	II	3
4.	I	-
5.	IX (PPPK)	4
6.	V (PPPK)	2
7.	PPPK PW	42

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2025

Tabel 1.4.1.2. : Jumlah Pegawai ASN, PPPK dan TTK/PPPK PW pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat Berdasarkan Alokasi Unit Kerja Tahun 2025

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	TTK/PPPK PW	JUMLAH
1.	Sekretariat	8	4	9	21
2.	Bidang Perkebunan	4	-	3	7
3.	Bidang Peternakan	11	1	20	32
4.	Bidang Prasarana dan Sarana	4	-	3	7
5.	Bidang Penyuluhan	3	1	5	9
6.	UPT Perlindungan Tanaman	1	-	1	2
7.	UPT Puskesmas dan IB	1	-	1	2
	JUMLAH	32	6	42	80

Sumber : Data ASN dan TTK Disbunak Tahun 2025

Tabel 1.4.1.3. : Jumlah Pegawai ASN, PPPK dan TKK/PPPK PW Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS (orang)	Jumlah PPPK (orang)	Jumlah TKK/PPPK PW (orang)
1.	S2	1	-	-
2.	S1	27	4	15
3.	D3	-	-	1
4.	D2	-	-	-
5.	D1	-	-	-
6.	SLTA	4	2	-
7.	SLTP	-	-	26
8.	SD	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2025

Tabel 1.4.1.4 : Jumlah Pegawai ASN, PPPK dan TKK Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Jabaran Tahun 2025.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN (orang)	Jumlah PPPK (orang)	Jumlah TKK/PPPK PW (orang)
A.	Struktural			
	Eselon II.a	1	-	-
	Eselon III.a	1	-	-
	Eselon III.b	3	-	-
	Eselon IV.a	1	-	-
	Eselon IV.b	2	-	-
B.	Fungsional			
	Fungsional	15	-	-
C.	Pelaksana	9	6	42
	JUMLAH	32 Orang	6 Orang	42 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Disbunak Tahun 2025

1.4.2. Kelembagaan

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini ditangani oleh berbagai kelembagaan formal maupun informal dengan peran dan fungsinya yang secara umum sudah terbagi secara proposional, meskipun demikian dari teknis dan non teknis pelaksanaan fungsi dan peran kelembagaan tersebut belum dapat terfasilitasi secara optimal.

Aspek kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan terutama sekali jika dikaitkan dengan kelembagaan formal sebagai pengawal kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disamping secara formal ditangani oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga banyak melibatkan peran dari lembaga formal maupun informal lainnya, antara lain :

- a. Lembaga Tingkat Pusat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam proses pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Medan, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta beberapa UPT Pusat yang secara khusus menangani komoditas tanaman perkebunan.
- b. Lembaga Tingkat Provinsi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik langsung maupun tidak langsung antara lain yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) Provinsi Jambi, UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) Provinsi Jambi serta Balitbangda Provinsi Jambi.
- c. Organisasi/kelembagaan yang terkait dengan pembangunan perkebunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Asosiasi Petani Kelapa Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Petani Karet Indonesia, Masyarakat Pencinta Indikasi Geografis (MPIG) Kopi dan Pinang, Asosiasi Petani Rempah Indonesia serta LSM Setara.

1.4.3. Sarana dan Prasarana

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini juga telah ditunjang oleh keberadaan sarana prasarana yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain berupa Kebun Sumber Benih Kopi Libtukom, Kebun Percontohan Kopi Libtukom, Kebun Percontohan Kelapa Sawit, UPT Puskeswan dan IB, UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan, Kandang Ternak di Bram Itam, Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Perkebunan dan Peternakan serta Prasarana Budidaya (saluran Tata Air Mikro, Lantaijemur Pinang dan Jalan Produksi).

Upaya penyediaan sarana prasarana perkebunan dan peternakan tersebut telah dilakukan melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN yang bersifat stimulant untuk mendorong masyarakat/petani dalam memfasilitasi kebutuhannya secara swadaya.

Adapun sarana prasarana aparatur yang mendukung aktivitas pokok dan secara langsung dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan serta merupakan aset dinas adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.4.1. 5. : Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Dinas	1 unit	Baik
2.	UPT Perlindungan Perkebunan	1 unit	Baik
3.	UPT IB dan Puskeswan	4 unit	Rusak Berat
4.	Kebun Percontohan Kelapa Sawit	1	Baik
5.	Kebun Percontohan Kopi Libtukom	1 Ha	Baik
6.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit	Baik
7.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	3 unit	Baik
8.	Kendaraan Dinas Operasional (lapangan dan Jabatan) Roda 2 (dua)	11 unit 21 unit	Baik Baik
9.	Kendaraan Roda 3 (Viar)	2 unit	Baik

Sumber data : Laporan Aset dan Bangunan bulan Desember 2025

1.5. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu – isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan isu – isu strategis yang sedang terjadi maupun isu – isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi Sumber Daya Manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas juga mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan perkebunan dan peternakan yang masih menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diinventarisasi dan dipetakan dalam suatu pohon masalah untuk pemahaman dalam penentuan kebijakan.

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan selama tahun 2025 dihadapkan kepada beberapa permasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut :

Tabel 1. 5. : Isu – Isu Strategis berdasarkan Permasalahan dari Sektor Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025
Dnas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Bidang Perkebunan</u>					
Produktivitas Komoditi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet	Produktivitas Komoditi Perkebunan tahun sekarang dibagi produktivitas komoditi perkebunan tahun lalu	a. SDM Petugas Bidang Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan c. Banyak tanaman tua/tanaman rusak	a. Pengetahuan petani yang masih rendah dalam penerapan Teknologi Tepat Guna. b. Perubahan iklim dan bencana alam c. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan d. Ketersediaan bibit unggul pinang, kopi dan kelapa dalam e. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan f. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah	a. Masih kurangnya anggaran yang langsung bersentuhan dengan petani b. Kurangnya pelatihan yang berkesinambunga n bagi tenaga teknis perkebunan c. Kurangnya SDM teknis d. Pengetahuan SDM Bidang Perkebunan dalam penguasaan teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan
<u>Bidang Peternakan</u>					
Populasi ternak.	Populasi ternak : - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 1,2 % per tahun	a. Masih perlunya peningkatan SDM Petugas peternak b. Masih adanya	a. Masih adanya pemotongan ternak betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas	a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis b. Kelembagaan dan SDM Peternak dan Tenaga Teknis c. Minimnya sarana

			kematian pedet (anak sapi), abortus pada ternak dan interval kelahiran yang masih jauh c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya tenaga medis dan paremedis e. Belum tersedianya HPT Unggul	c. Masih adanya Pencurian ternak d. Masih adanya keluar masuk ternak yang tidak terdata	dan prasarana pelayanan teknis
--	--	--	--	--	--------------------------------

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2021-2026

Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2025 telah diupayakan untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran APBD, APBN dan sumber lainnya yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan sebagaimana telah dikemas di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LKj ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala OPD kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan selama Tahun 2025 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKj ini.

Dalam LKj ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor

Perkebunan dan Peternakan pada Tahun 2027, yang diselenggarakan melalui 7 (tujuh) Program, yang terdiri dari yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Program Pokok dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, yang mana keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut :

- Bagian Sampul dan Pengantar berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.
- Bab I Pendahuluan
Berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja
Menyajikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
Berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang telah digunakan.
- Bab IV Penutup
Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (2021 - 2026).

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja (LKj) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKj ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 telah dirumuskan pada tahun 2025, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2025-2029.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat Tahun 2025-2029 tersebut, adalah sebagai berikut :

2.1.1. VISI dan MISI Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian serta melihat potensi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Visi :

Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah kondisi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2029. Visi tersebut memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 3 (tiga) *Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029* sebagai berikut:

KODE	MISI
MISI 1	Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tentram, tertib, mantap dan inovatif
MISI 2	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
MISI 3	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada Misi Kedua, yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan Misi Ketiga, yaitu Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan prioritas pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar sektor Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sektor Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi program/kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.1.2. TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditetapkanlah Tujuan Strategis.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Strategis Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2025. Selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah Sasaran Strategis dapat mengkonfirmasi Tujuan Strategis yang akan dicapai pada masa

mendatang. Hal tersebut tergambar sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.2 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Pekebun/Peternak)	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :						
			- Kelapa Sawit	155.591	158.080	160.569	162.186	164.248	166.737
			- Karet	2.760	2.771	2.784	2.801	2.818	2.853
			- Kelapa dalam	55.610	56.054	56.558	57.180	57.808	58.436
			- Kopi	1.131	1.135	1.141	1.149	1.157	1.163
			- Pinang	14.173	14.314	14.471	14.645	14.820	14.995
		2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) :						
			- Sapi	6.577	6.708	6.843	6.980	7.119	7.258
			- Kerbau	318	323	328	333	338	343
			- Kambing	8.025	8.235	8.441	8.652	8.869	9.086
			- Domba	128	130	133	135	138	141
			- Unggas	1.035.463	1.048.056	1.060.827	1.073.8778	1.086.913	1.100.234
2.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,00	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00
			- Nilai IKM Perangkat Daerah	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2025-2029

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan Strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

Strategi:

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan petani/pekebun.
2. Peningkatan Populasi dan Produksi ternak secara optimal.
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. *Kebijakan Umum* Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik, reformasi birokrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien.

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan inseminasi buatan, penyediaan hijauan pakan ternak berkualitas dan penyediaan pelayanan kesehatan hewan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan melalui bantuan saprodi, alsintan dan peralatan teknologi.
5. Peningkatan hilirisasi komoditi perkebunan melalui penyediaan teknologi, penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
6. Peningkatan pengendalian dan pencegahan bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan serta penanganan dan pengendallian kebakaran lahan kebun.
7. Fasilitasi, pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha perkebunan.
8. Mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan dan peternakan yang baik melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.

**Tabel 2.1.3 : Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025 – 2029**

VISI : Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Inovatif)			
MISI 3 : “ Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan”			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Pekebun/Peternak)	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Meningkatkan produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun/petani	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan melalui bantuan saprodi, alsintan dan peralatan teknologi. 3. Peningkatan hilirisasi komoditi perkebunan melalui penyediaan teknologi, penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan. 4. Peningkatan pengendalian dan pencegahan bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan serta penanganan dan pengendallian kebakaran lahan kebun. 5. Fasilitasi, pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha perkebunan. 6. Mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang baik melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan populasi dan produksi ternak secara optimal	1. Meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan inseminasi buatan, penyediaan hijauan pakan ternak berkualitas dan penyediaan pelayanan kesehatan hewan.

			2. Peningkatan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan saprodi, alsintan dan peralatan teknologi 3. Mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani peternak yang baik melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.
MISI 2 : “ Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ”.			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan pelayanan publik, reformasi birokrasi melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2025-2029

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan telah mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Peraturan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dari kinerja ini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada Renstra 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2025
1.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan menjaga kelestarian lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan Secara Optimal 2. Meningkatnya Populasi Ternak	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang 2. Jumlah Populasi Ternak - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	Jumlah Produksi pada tahun t) Mengukur populasi ternak pada tahun sekarang (t) = jumlah populasi ternak tahun lalu + kelahiran + pemasukan – kematian – pengeluaran – pemotongan	155.591 2.760 55.610 1.131 14.173 6.577 318 8.035 128 1.035.463

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2025-2029

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 sendiri dengan anggaran sebesar Rp. 13.485.327.813.- (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang diselenggarakan melalui 7 (tujuh) Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Program Pokok dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, yang mana keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD II Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah sebagai berikut :

1.	Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2.	Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3.	Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan Sanksi
4.	Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5.	Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

2.4.1. PERJANJIAN KINERJA

2.4.1.1. PERJANJIAN KINERJA UTAMA

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Bupati), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis OPD.

Untuk Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 2.4.1.1: Target Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	TARGET 2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang	 155.591 2.760 55.610 1.131 14.173
	2. Meningkatnya Populasi Ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	 6.577 318 8.035 128 1.035.463
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah	 79,00 85,00

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2025-2029

2.4.1.2. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah yang memuat komitmen untuk mencapai target kinerja tertentu dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja disusun sebagai wujud pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025 sebagaimana tertera dibawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang	155.591 2.760 55.610 1.131 14.173
2.	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor) : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	6.000 315 7.884 126 1.225.328
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah	79,00 85,00

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 3.367.301.978,00	APBD Kabupaten
2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.674.877.200,00	APBD Kabupaten
3. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 561.342.236,00	APBD Kabupaten
4. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	201.871.565,00	APBD Kabupaten
5. Perizinan Usaha Pertanian	Rp 149.845.000,00	APBD Kabupaten
6. Penyuluhan Pertanian	Rp 250.247.300,00	APBD Kabupaten
7. Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 7.279.842.534,00	APBD Kabupaten
Jumlah	13.485.327.813,00	

Kuala Tungkal, Oktober 2025

Bupati Tanjung Jabung Barat
(Pihak Kedua)


Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
(Pihak Pertama)


Drs. RIDUWAN
NIP. 19740308 200012 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Tanggal 10 bulan berikutnya - 12 laporan
2.	Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Ketepatan waktu penyampaian - Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	- Februari 2025 - 100%
3.	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setiap Triwulan dan Tahunan	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- 20 Januari 2025 - 5 laporan
4.	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	- Ketepatan waktu penyampaian - Nilai AKIP Perangkat Daerah	- 20 Januari 2025 - 79
5.	Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	- Ketepatan waktu penyampaian - Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Januari 2025 - 1 laporan LPPD OPD
6.	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	- Februari 2025 - 1 laporan
7.	Menyampaikan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah bahan, data penyusunan LKPJ	- Januari 2025 - 2 bahan penyusun LKPJ
8.	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	- Ketepatan waktu penyampaian - Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	- 31 Maret 2025 - 100%
9.	Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah rekomendasi BPK RI dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	- Januari 2025 - 1 laporan
10.	Menyampaikan laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah laporan E-Kinerja yang disampaikan	- Tanggal 10 bulan berikutnya - 172 laporan

Bupati Tanjung Jabung Barat
(Pihak Kedua)

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag.

Kuala Tungkal, Oktober 2025
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
(Pihak Pertama)

Drs. RIDUWAN

NIP. 19740306 200012 1 001

2.4.1.3. PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Eselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome).

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kegiatan yang disepakati antara Kepala Bidang Eselon III dan Kasubbag/Fungsional/ Eselon IV merupakan Indikator Kinerja (Output). Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran *Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025*. Adapun untuk tahun 2025 ini Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan yang dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Perjanjian Kinerja Program (Outcome) Tahun 2025
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2025	Penanggung jawab
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	1. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1. Persentase peningkatan produktivitas komoditi perkebunan 2. Angka Penanggulangan OPT dan gangguan usaha perkebunan 3. Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya 4. Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan 5. Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,9%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1.1% ,kopi = 0,7% pinang = 1,2% 2. 100 % 3. 25 % 4. 750 STDB 5. 40 %	Kepala Bidang Perkebunan Kepala Bidang Perkebunan Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Sapras dan Kepala Bidang Peternakan Kepala Bidang Sapras Kepala Bidang Penyuluhan
	2. Meningkatnya populasi ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	6. Angka kebuntingan sapi yang di IB 7. Angka Kematian Ternak	6. Angka Kebuntingan Sapi = 74 % 7. 1.3 %	Kepala Bidang Peternakan Kepala Bidang Peternakan
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah	70.20 % 80.45 %	Sekretaris Sekretaris

Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2025
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2025	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan (ton	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1. Persentase peningkatan produktivitas komoditi perkebunan 2. Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya 3. Angka Penanggulangan Serangan OPT dan Gangguan Usaha Perkebunan 4. Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan 5. Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok tani dan	1. Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pendukung perkebunan 2. Meningkatnya penjaminan kemurnian, kelestarian, pemanfaatan dan kualitas SDG Tanaman 1. Bertambahnya jumlah prasarana yang mendukung produktivitas sektor perkebunan 1. Terkendalinya OPT Tanaman Perkebunan dan Penanganan Kebakaran Lahan /Kebun Masyarakat 1. Meningkatnya petani pekebun yang memiliki STDB 1. Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Kelembagaan serta penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana	100 % 100 % 27 unit 100 % 100 % 53 unit	Kabid Perkebunan Kabid Saprass Kabid Perkebunan Kabid Saprass Kabid Penyuluhan

			informasi sektor perkebunan/peternakan	penyuluhan pertanian		
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	1. Angka kebuntingan sapi yang di IB 2. Angka Kematian Ternak	1. Meningkatnya Penjaminan Kemurnian kelestarian, kualitas SDD Hewan 2. Meningkatnya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 3. Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah 1. Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak 2. Terlaksananya pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan 3. Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner	1. 100 % 2. 800 ekor, 0,8 ton 3. 1 Laporan 1. 100 % 2. 1 laporan 3. 1 laporan	Kabid Peternakan
2..	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Renstra, Renja,DPA,Evaluasi Renstra,Evaluasi Renja dan Lakip 2. Laporan Keuangan Tahunan OPD 3. Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN 4. Cakupan Layanan Administrasi Umum 5. Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemda	1. 13 dokumen 2. 1 laporan 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 %	Bidang Sekretariat

				6. Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	6.100 %	
				7. Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda	7.100 %	

2.4.3. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025

Adapun Pagu Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	TOTAL APBD	13.485.327.813.-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.279.842.534.-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.337.000.-
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.135.000.-
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.202.000.-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.937.773.778.-
	3 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.718.363.778.-
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.410.000.-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.000.000.-
	5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.000.000.-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.571.756.-
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.058.000.-
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.934.756.-
	8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.550.000.-
	9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.750.000.-
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000.-

	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.079.000.-
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.600.000.-
	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.100.000.-
	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.500.000.-
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.850.000.-
	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.750.000.-
	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.700.000.-
	16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.400.000.-
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.710.000.-
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.706.000.-
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	170.544.000.-
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.810.000.-
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	520.650.000.-
2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.367.301.978.-
8		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	319.940.000.-
	21	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	319.940.000.-
9		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	588.503.400.-
	22	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	298.991.400.-
	23	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	216.132.000.-
	24	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	73.380.000.-
10		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.458.858.578.-
	25	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lainnya	14.900.000.-
	26	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.443.958.578.-

3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.674.877.200.-
11		Pengembangan Prasarana Pertanian	1.505.977.200.-
	27	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.505.977.200.-
12		Pembangunan Prasarana Pertanian	108.550.000.-
	28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0.-
	29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	69.050.000.-
	30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	39.500.000.-
12		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	60.350.000.-
	31	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	60.350.000.-
4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	561.342.236.-
13		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	539.213.236.-
	32	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam satu kabupaten/kota	539.213.236.-
14		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	11.600.000.-
	33	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ Pengeluaran Hewan, Produk dan Media Pembawa Penyakit Hewan (HPM)	11.600.000.-
15		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.529.000.-
	34	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	10.529.000.-
5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	201.871.565.-
16		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	201.871.565.-
	35	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	62.446.565.-
	36	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	139.425.000.-
6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	149.845.000.-

17		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.845.000.-
	37	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	149.845.000.-
7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	250.247.300.-
18		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	250.247.300.-
	38	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	162.999.800.-
	39	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	87.247.500.-
JUMLAH ANGGARAN 2025			13.485.327.813.-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD dan,
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian

kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Selanjutnya dalam rangka memastikan keterukuran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, pengukuran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun secara berjenjang dan terstruktur berdasarkan level kinerja, yaitu:

1. Level Strategis (Outcome)
2. Level Taktikal (Output Program)
3. Level Operasional (Output Kegiatan)

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih

persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar $>0\%$ maka dikategorikan “Efisien”, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan “Kurang Efisien”.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan “Efektif” dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan “Kurang Efektif”.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2.1 Analisis Capaian IKU

Target Kinerja Tahun 2025 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Penetapan Indikator Kinerja (IKU) telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut maka realisasi capaian kinerja bisa diukur dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1 : REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025*	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa dalam - Kopi - Pinang	Ton	155.591 2.760 55.610 1.131 14.173	154.273 2.677 55.484 1.140 14.246	99,15 96,99 99,77 100,80 100,52	
	Rata-rata Realisasi Sasaran 1					99,45	Sangat Tinggi
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	Ekor	6.577 318 8.035 128 1.035.463	6.545 317 7.986 127 1.019.463	99,51 99,69 99,39 99,22 98,45	
	Rata-rata Realisasi Sasaran 2					99,25	Sangat Tinggi
	CAPAIAN KINERJA (RATA-RATA)					99,25	Sangat Tinggi

Sumber : Renstra Disbunak 2025–2029 dan Data ASEM Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja IKU Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil mencapai kinerja yang sangat memuaskan dengan rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 99,25 persen dan berada pada kategori "Sangat Tinggi".

Sasaran peningkatan produksi komoditi perkebunan mencapai rata-rata 99,45 persen sementara sasaran peningkatan populasi ternak mencapai 99,25 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, ketepatan perencanaan, serta dukungan pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor perkebunan dan peternakan. Hasil pengukuran IKU Tahun 2025 tersebut merupakan capaian Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Level Strategis (*Outcome*).

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan

tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Namun hal ini tentunya masih diperlukan langkah – langkah strategis untuk menjaga konsistensi kinerja serta mendorong peningkatan capaian pada tahun berikutnya. Adapun rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan berbasis kinerja dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis dan indikator utama sehingga output dan outcome yang dihasilkan semakin optimal
2. Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan, melalui penguatan pendampingan teknis, penerapan teknologi budidaya yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
3. Penguatan kelembagaan populasi ternak, khususnya dengan pengendalian dan pencegahan penyakit ternak serta peningkatan akses peternak terhadap layanan kesehatan hewan.
4. Peningkatan kualitas dan akurasi data kinerja, dengan memperkuat sistem pendataan dan pelaporan secara periodik sehingga hasil pengukuran kinerja dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun petani pekebun dan peternak melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan berkelanjutan.
6. Penguatan koordinasi lintas sektor, guna mendukung keberlanjutan program pembangunan perkebunan dan peternakan serta mengantisipasi resiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja.

3.2.2. Analisis Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun-tahun sebelumnya

Analisis capaian/realisasi indikator kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 menunjukkan adanya konsistensi capaian kinerja yang tinggi apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara

berkesinambungan serta didukung oleh perencanaan yang semakin baik. Perbandingan capaian/realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2.2 dibawah berikut :

Tabel 3.2.2. : Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 Terhadap Tahun-tahun sebelumnya.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA	REALISASI				Tahun 2025*			TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				2021	2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	- Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan :	Ton									
	- Kelapa Sawit		122.815	122.815	145.538	152.563	156.381	155.591	154.273	99,15	158.080
	- Karet		3.256	3.256	3.111	3.028	2.829	2.760	2.677	96,99	2.771
	- Kelapa dalam		55.147	55.147	54.081	54.265	55.202	55.610	55.484	99,77	56.054
	- Kopi		1.160	1.160	1.144	1.140	1.127	1.131	1.140	100,80	1.135
	- Pinang		8.629	8.629	13.871	13.933	14.042	14.173	12.246	100,52	14.314
	- Jumlah Populasi Ternak	Ekor									
	- Sapi		9.038	9.038	9.151	9.198	9.396	6.577	6.545	99,51	6.708
	- Kerbau		731	731	748	750	768	318	317	99,69	323
	- Kambing		46.784	46.784	48.010	48.350	49.588	8.035	7.986	99,39	8.235
	- Domba		819	819	809	799	843	128	127	99,22	130
	- Unggas		1.486.261	1.486.261	2.092.871	1.302.865	1.569.029	1.035.463	1.019.463	98,45	1.048.056
Rata-rata Capaian Kinerja										99,35	
2.	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	64.23	64.23	67.64	70.05	74.06	79,00	79,10	100,13	79,50
	- Nilai IKM Perangkat Daerah	%	-	-	85.04	85.04	79.98	85,00	81,77	96,20	85,50
Rata-rata Capaian Kinerja										98,16	

Sumber : Renstra Disbunak 2025-2029 dan Data ASEM Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Dari tabel 3.2.2 tersebut diatas dapat kita jelaskan analisis multi-tahun menunjukkan dinamika perubahan yang bervariasi pada masing-masing sektor, di mana beberapa indikator berhasil mempertahankan pertumbuhan positif, sementara beberapa lainnya mengalami pelambatan atau penyesuaian target. Pada sektor Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan, tren penurunan yang paling mencolok terlihat pada komoditi Karet. Realisasi produksi komoditi karet terus merosot secara konsisten setiap tahun, dari 3.256 Ton pada tahun 2021 menjadi 3.111 Ton (2022), 3.028 Ton (2023), 2.829 Ton (2024), hingga mencapai titik terendahnya di angka 2.677 Ton pada tahun 2025. Sebaliknya, komoditi Kelapa Sawit sempat menunjukkan lonjakan produksi yang pesat dari tahun 2021 (122.815 Ton) hingga puncaknya di tahun 2024 (156.381 Ton), sebelum akhirnya mengalami sedikit penurunan realisasi di tahun 2025 menjadi 154.273 Ton. Untuk komoditi Kelapa Dalam dan Kopi, realisasinya cenderung bergerak stabil dan fluktuatif dalam batas wajar selama lima tahun terakhir. Sementara itu, komoditi Pinang mencatatkan lonjakan realisasi yang masif pada tahun 2022 (13.871 Ton) dibandingkan tahun 2021 (8.629 Ton), dan berhasil mempertahankan stabilitas produksinya di kisaran 13-14 ribu Ton hingga tahun 2024, meskipun realisasi tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 12.246 Ton.

Pada sektor Jumlah Populasi Ternak, terjadi pola pergeseran data yang sangat signifikan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan periode 2021–2024. Selama empat tahun pertama (2021–2024), populasi ternak besar dan kecil seperti Sapi, Kerbau, Kambing, dan Domba umumnya menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan meningkat secara bertahap setiap tahunnya, sebagai contoh, populasi ternak Kambing tumbuh dari 46.784 ekor (2021) menjadi 49.588 ekor (2024). Namun, pada tahun 2025, angka target dan realisasi untuk seluruh jenis ternak tersebut disesuaikan secara drastis menjadi jauh lebih kecil (populasi Kambing di tahun 2025 turun menjadi 7.986 ekor). Hal serupa juga terjadi pada populasi Unggas yang sempat berfluktuasi tinggi dengan puncaknya pada tahun 2022 mencapai 2.092.871 ekor, lalu disesuaikan menjadi 1.019.463 ekor pada

tahun 2025. Penurunan angka yang masif di tahun 2025 ini mengindikasikan adanya perubahan metodologi penghitungan, pemutakhiran basis data makro, atau reorientasi kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang baru.

Pada sektor Indikator Kinerja Perangkat Daerah, aspek akuntabilitas institusi menunjukkan keberhasilan dan lompatan performa yang paling konsisten. Nilai AKIP Perangkat Daerah tercatat terus merangkak naik tanpa penurunan, dimulai dari angka 64,23 pada tahun 2021, meningkat menjadi 67,64 (2022), 70,05 (2023), 74,06 (2024), hingga mencapai puncaknya di angka 79,10 pada tahun 2025. Tren positif ini mencerminkan adanya reformasi birokrasi dan perbaikan sistem manajemen kinerja yang sukses di internal pemerintahan. Di sisi lain, Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) menunjukkan tren yang kurang stabil. Setelah berhasil mempertahankan nilai tinggi sebesar 85,04 pada tahun 2022 dan 2023, nilai kepuasan masyarakat ini justru mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 79,98. Meskipun pada tahun 2025 realisasinya berhasil berbalik naik (rebound) ke angka 81,77, capaian ini masih belum mampu menyamai performa optimal yang pernah diraih pada tahun 2022–2023 silam, sehingga menjadi catatan penting untuk evaluasi kerja ke depan.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Dari tabel 3.2.2. diatas dapat juga dianalisa bahwa capaian kinerja tahun 2025 berada pada kategori sangat berhasil, dengan mayoritas indikator mampu mendekati atau bahkan melampaui sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Berdasarkan kelompok indikator pertama yang mencakup sektor perkebunan dan peternakan, rata-rata capaian kinerja kumulatif sukses menyentuh angka 99,35%. Sementara itu, kelompok indikator kedua yang mengukur kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik mencatatkan rata-rata capaian sebesar 98,16%. Tingginya persentase capaian ini mencerminkan perencanaan target yang realistis serta pelaksanaan program kerja yang relatif efektif sepanjang tahun berjalan.

Di sektor Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan, dari 5 (lima) komoditi strategis yang dievaluasi, dua di antaranya berhasil mencatatkan rapor hijau karena melampaui target yang dibebankan. Komoditi Kopi menjadi yang paling unggul dengan merealisasikan produksi sebesar 1.140 Ton dari target 1.131 Ton (capaian 100,80%), disusul oleh komoditi Pinang dengan persentase capaian sebesar 100,52%. Di sisi lain, tiga komoditi lainnya mencatatkan realisasi yang sangat meyakinkan karena berada di ambang batas target. Produksi Kelapa Dalam menempati posisi terdekat dengan target lewat realisasi 55.484 Ton dari sasaran 55.610 Ton (capaian 99,77%), diikuti oleh Kelapa Sawit dengan realisasi sebesar 154.273 Ton dari target 155.591 Ton (capaian 99,15%). Adapun komoditi Karet menjadi yang paling rendah di sektor ini dengan capaian 96,99%, di mana realisasi produksinya tertahan di angka 2.677 Ton dari target sebesar 2.760 Ton.

Pada sektor Jumlah Populasi Ternak, seluruh sub-indikator memperlihatkan tingkat kepatuhan realisasi yang sangat konsisten, seragam, dan stabil di atas angka 98%. Populasi Kerbau mencatatkan efektivitas tertinggi dengan realisasi 317 ekor dari target 318 ekor (capaian 99,69%). Kinerja memuaskan ini diikuti secara ketat oleh populasi Sapi yang terealisasi sebanyak 6.545 ekor dari target 6.577 ekor (capaian 99,51%), Kambing dengan realisasi 7.986 ekor dari target 8.035 ekor (capaian 99,39%), serta Domba dengan realisasi 127 ekor dari target 128 ekor (capaian 99,22%). Komoditi Unggas yang memiliki volume terbesar juga berhasil ditutup dengan capaian optimal sebesar 98,45%, melalui realisasi populasi sebanyak 1.019.463 ekor dari target yang dipatok sebesar 1.035.463 ekor.

Sementara itu, hasil yang kontras terlihat pada Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mempertemukan antara aspek akuntabilitas internal dan persepsi publik. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mencatatkan prestasi gemilang dengan melampaui target tahunan, meraih realisasi nilai 79,10 dari target 79,00 (capaian 100,13%). Keberhasilan pada aspek manajemen internal ini sayangnya belum berjalan beriringan dengan aspek pelayanan eksternal. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) belum mampu memenuhi ekspektasi target tahun 2025, di

mana realisasinya hanya menyentuh angka 81,77 dari target yang ditetapkan sebesar 85,00 (capaian 96,20%). Kurang optimalnya capaian Nilai IKM ini menjadi satu-satunya catatan kritis dalam analisis kepatuhan target 2025, sekaligus menjadi area intervensi utama yang harus segera dibenahi oleh organisasi.

3.2.4. Analisis Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dapat dianalisis dengan membandingkannya terhadap target kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target renstra. Hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.4. : Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2023			Tahun 2024			Tahun 2025*		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	- Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan :	Ton									
	- Kelapa Sawit		125.166	152.563	121,88	127.419	156.381	122,73	155.591	154.273	99,15
	- Karet		3.867	3.028	78,30	3.890	2.829	72,72	2.760	2.677	96,99
	- Kelapa dalam		55.989	54.265	96,92	56.549	55.202	97,62	55.610	55.484	99,77
	- Kopi		1.200	1.140	95,00	1.207	1.127	93,37	1.131	1.140	100,80
	- Pinang		10.780	13.933	129,25	10.909	14.042	128,72	14.173	12.246	100,52
	- Jumlah Populasi Ternak	Ekor									
	- Sapi		9.452	9.198	97,31	9.641	9.396	97,46	6.577	6.545	99,51
	- Kerbau		773	750	97,02	788	768	97,47	318	317	99,69
	- Kambing		50.163	48.350	96,38	51.166	49.588	96,92	8.035	7.986	99,39
	- Domba		861	799	92,79	878	843	96,01	128	127	99,22
	- Unggas		1.553.260	1.302.865	83,88	1.584.799	1.569.029	99,00	1.035.463	1.019.463	98,45
2.	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	69.90	70.05	100,21	70.10	74.06	105,65	79,00	79,10	100,13
	- Nilai IKM Perangkat Daerah	%	80.35	85.04	105,84	80.40	79.98	99,48	85,00	81,77	96,20

Sumber : Renstra Disbunak 2025-2029 dan Data ASEM Statistik Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025

Dari tabel 3.2.4 diatas dapat kita simpulkan bahwa untuk sektor perkebunan, untuk produksi Kopi dan Pinang sukses melampaui target tahun 2025 (Kopi 100,80% dan Pinang 100,52%). Kelapa Sawit (99,15%) dan Kelapa Dalam (99,77%) berkinerja stabil mendekati target. Sebaliknya, komoditi Karet terus mengalami penurunan volume produksi tahunan secara konsisten, meskipun persentase capaian targetnya membaik (96,99%) berkat penyesuaian target yang lebih realistis. Sedangkan untuk sektor peternakan, semua jenis populasi ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Unggas) mencatatkan tingkat capaian target tertinggi dan paling stabil pada tahun 2025, yaitu kompak berada di kisaran 98% – 99%. Namun, secara volume nominal terjadi penurunan angka target dan realisasi yang sangat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan adanya pemutakhiran basis data atau perubahan metodologi pendataan.

Selanjutnya untuk kinerja perangkat daerah, Nilai AKIP Perangkat Daerah menjadi capaian paling impresif karena sukses melampaui target (100,13%) dan realisasinya terus naik secara linier setiap tahun (70,05 di 2023, 74,06 di 2024, hingga 79,10 di 2025). Di sisi lain, Nilai IKM (Kepuasan Masyarakat) mengalami penurunan kualitas, di mana capaian tahun 2025 (96,20%) merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir dan belum mampu menyamai performa optimal tahun 2023 (85,04).

3.2.5. Analisis Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra.

Realisasi kinerja Tahun 2025 juga dapat dianalisis dengan membandingkannya terhadap target kinerja jangka menengah yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2025-2029. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai atau mendekati target tahapan awal renstra sehingga mencerminkan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel 3.2.5. : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2025-2029.

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					Realisasi Tahun 2025
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Ton							
	1. Kelapa Sawit		153.292	155.591	158.080	158.336	161.186	164.248	154.273
	2. Karet		2.752	2.760	2.771	2.784	2.801	2.818	2.677
	3. Kelapa Dalam		55.224	55.610	56.054	56.558	57.180	57.808	55.484
	4. Kopi		1.128	1.131	1.135	1.141	1.149	1.157	1.140
	5. Pinang		14.047	14.173	14.314	14.471	14.645	14.820	12.246
2.	Jumlah Populasi Ternak	Ekor							
	1. Sapi		6.448	6.577	6.708	6.843	6.980	7.119	6.545
	2. Kerbau		314	318	323	328	333	338	317
	3. Kambing		7.839	8.035	8.235	8.441	8.652	8.869	7.986
	4. Domba		125	128	130	133	135	138	127
	5. Unggas		1.023.044	1.035.463	1.048.056	1.060.827	1.073.778	1.086.913	1.019.463
3.	Nilai Akip OPD		74,06	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	79,10
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,98	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	81,77

Sumber : Renstra Disbunak Tahun 2025-2029 dan data statistik perkebunan dan peternakan angka sementara tahun 2025

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa secara umum capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan baseline tahun 2024, namun sebagian besar indikator belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan. Pada indikator jumlah produksi komoditi perkebunan, realisasi produksi kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi dan pinang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih berada dibawah target tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan produksi yang positif meskipun laju peningkatan belum optimal.

Selanjutnya pada indikator jumlah populasi ternak, realisasi populasi sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas juga cenderung meningkat dibandingkan baseline tahun 2024 tetapi belum mencapai target renstra

tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengembangan populasi ternak telah berjalan namun masih memerlukan penguatan program dan dukungan sarana dan prasarana agar target tercapai. Sementara itu pada indikator nilai AKIP OPD dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) realisasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola kinerja dan kualitas pelayanan publik, meskipun perlu peningkatan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 berada pada kategori cukup baik dan menjadi dasar yang positif untuk pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029, dengan tetap diperlukan langkah perbaikan dan penguatan strategi pelaksanaan program agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

3.2.6. Analisa Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional



Berdasarkan gambar diatas dapat kita analisis dan simpulkan bahwa untuk beberapa komoditi yang menjadi target produksi komoditas strategis tahun 2025 seperti kopi, kelapa dalam, daging sapi, kerbau dan ayam dapat uraikan bahwa dari target nasional untuk komoditi kopi sebesar 772.000 ton dibandingkan dengan target daerah sebesar 1.140 ton

disimpulkan bahwa realisasi produksi kopra ditingkat daerah berkontribusi sekitar 0,15% terhadap pemenuhan target nasional. produksi ini kemungkinan besar sudah sangat mencukupi untuk konsumsi atau pasar lokal di daerah meskipun tidak berdampak besar bagi pasokan nasional. Untuk komoditi kelapa dalam Produksi Kelapa Dalam di daerah memberikan kontribusi sebesar 1,93% dari total target strategis nasional 2025. Artinya memberikan kontribusi yang signifikan untuk skala daerah: Angka mendekati 2% untuk satu daerah/kabupaten/kota terhadap target seluruh Indonesia (38 provinsi) adalah angka yang cukup besar dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran strategis dan potensial sebagai salah satu wilayah penyokong (pendukung utama) komoditas kelapa di tingkat nasional.

Sedangkan untuk komoditas peternakan seperti daging sapi dan kerbau dibandingkan dengan target nasional populasi sapi dan kerbau berfungsi sebagai basis aset potong lokal yang intinya memenuhi pasokan daging guna mengejar target produksi nasional sebesar 399.41 ton tersebut. Selanjutnya pada komoditi daging ayam sendiri untuk populasi ayam memiliki populasi yang cukup besar yakni menembus 1 juta ekor pada tahun 2025. Jumlah ini menjadi bagian dari rantai suplai daerah untuk menopang Target Produksi Daging Ayam Nasional yang dipatok sangat tinggi, yaitu 4,34 Juta Ton.

1. analisis capaian kinerja program (capaian output, capaian outcome dan narasi) dari setiap program yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Strategis.

3.2.7. Analisa Capaian Kinerja Program/Kegiatan (Capaian output/outcome) yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Strategis

Hasil Pencapaian Kinerja Tahun 2025 tentunya didukung oleh realisasi dari kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output dan Outcome) Tahun 2025 yang dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2.7. : REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT/OUTCOME) TAHUN 2025
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJAB BARAT

Urusan Pilihan

Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	(%) Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Prog	Keg						
3.27.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100 %	Sekretaris
3.27.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja,DPA,Evaluasi Renstra,Evaluasi Renja dan Lakip	13 dokumen	13 dokumen	100 %	
3.27.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	100 %	
3.27.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	100 %	
3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	42 orang/bulan	42 orang/bulan	100 %	
3.27.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
3.27.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN	100 %	100 %	100 %	
3.27.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	100 %	
3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	

3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100 %	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100 %	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100 %	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100 %	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemda	100 %	100 %	100 %	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor yang Disediakan	3 unit	3 unit	100 %	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	10 unit	100 %	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	100 %	100 %	100 %	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda	100 %	98,80 %	98,80 %	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	21 unit	21 unit	100 %	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	100 %	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	33 unit	100 %	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100 %	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%) 2. Angka Kebuntingan Sapi yang di Inseminasi Buatan (IB)	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,9%, karet = 0,6%, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinang = 1,2% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 74 %	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,6%, karet = 0,5 %, kelapa dalam = 1,0%, kopi = 0,6% pinang = 1,2% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 84 %	93,21 %	Kabid Perkebunan dan Kabid Peternakan
3.27.02.2.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	100 %	100 %	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Bertambahnya luas Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam, Kopi dan Pinang 2. Tekelolanya kebun percontohan Kopi dan Kelapa Sawit serta tersedianya bibit unggul komoditi	100 %	100 %	100 %	

		perkebunan 3. Jumlah Ternak yang di IB dan Sinkron				
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	3 VUB	100 %	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanamani	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	1. Tersedianya Sapi Bakalan di Kandang, Ternak Sapi, Kambing dan Unggas yang dihibahkan 2. Tersedianya Bibit Hijauan Pakan Ternak	1. 3.583 ekor, 2. 0,25 ton	1. 3.583 ekor, 2. 11,55 ton	100 %	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.583 ekor	3.583 ekor	100 %	
3.27.02.2.06.02	Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,25 ton	0,25 ton	100 %	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya	25 %	25 %	100 %	Kabid Saprasi/Sekretaris
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunnya dokumen tanggul perkebunan di 7 (tujuh) kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	113,93 %	
3.27.03.2.01.01	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas Kawasan Pertanian yang termanfaatkan	950 Ha	1.082 Ha	113,89 %	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1. Bertambahnya Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan/Peternakan 2. Terkelolanya kebun percontohan kelapa sawit	1 dokumen	1 dokumen	100 %	

3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 unit	16 unit	100 %	
3.27.03.2.02.10	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	17 unit	17 unit	100 %	
3.27.03.2.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.03.2.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kematian Ternak	1,3 %	1,2 %	108,33 %	Kabid Peternakan
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak	100 %	100 %	100 %	
3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04.2.01	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan	1 laporan	1 laporan	100 %	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04.2.02	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya laporan pelayanan jasa medik veteriner	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04.2.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	1 laporan	100 %	

3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Angka Penanggulangan serangan OPT dan gangguan usaha Perkebunan	100%	100%	100,75%	Kabid Perkebunan dan Kabid Peternakan
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendalinya OPT Perkebunan dan Kebakaran Lahan/Kebun Masyarakat	100 %	100 %	100,75 %	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	203 Ha	101,50 %	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	30 Ha	30 Ha	100 %	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan	750 STDB	862 STDB	114,93%	Kabid Saprasi – menyesuaikan anggaran yang ada
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya petani perkebunan yang mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)	100 %	100 %	100 %	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Peternakan	30 %	25 %	83 %	Kabid Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Meningkatkan Materi Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan dan Peternakan 2. Tersusunnya Data Komoditi Perkebunan/Peternakan	23 unit	14 unit	60,87 %	Menyesuaikan anggaran yang ada

3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21 unit	12 unit	57,14 %	Menyesuaikan anggaran yang ada
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 unit	2 unit	100 %	

Keterangan : OUTCOME dan OUTPUT telah menyesuaikan dengan APBD-P TA 2025

Sumber Data : E81 Triwulan IV bulan Desember 2025 dan Renstra 2021-2026

Dari tabel realisasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi fisik sebesar 90,28% (Sembilan puluh koma dua puluh delapan persen) dengan realisasi anggaran sebesar 88,39%. Dari capaian tersebut dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan capaian pada Level Taktikal (Output Program) tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas dimana rata-rata capaian program diatas 80% atau dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk capaian pada Level Operasional (Output Kegiatan) juga berada di kategori tinggi. Hanya ada satu sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang capaian tidak mencapai 60 %, hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya kegiatan HKP Tahun 2025 karena adanya edaran dari Provinsi Jambi untuk efisiensi anggaran.

Dari tabel tersebut juga dapat diuraikan bahwa untuk mendukung misi ke-3 yaitu “ Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan” tersebut ada beberapa program kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat melalui dana APBD. Untuk Tahun Anggaran 2025 kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman ini merupakan kegiatan untuk menjaga kelestarian SDG Tanaman Komoditi Perkebunan yang merupakan spesifik lokal seperti Kelapa Dalam Gambut, Kopi Libtukom dan Pinang Betara. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan jumlah Blok Penghasil Tinggi (BPT) yang terdapat pada kebun kelompok tani bisa bertahan dengan kondisi kebun yang terawat. Selain itu diharapkan dengan adanya Sosialisasi Penggunaan Benih Unggul bisa memacu pekebun untuk menggunakan benih unggul dalam berusaha di sektor perkebunan. Sedangkan untuk kebun yang telah ditetapkan sebagai BPT tahun 2025 ini mendapatkan bantuan pupuk dari dana APBN melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Adapun jumlah Pohon Induk Terpilih sampai dengan tahun 2025 yaitu untuk tanaman kelapa dalam sejumlah 3.717 PIK, tanaman pinang sejumlah 10.063 PIP dan 700 PIK untuk tanaman kopi.

2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) ini merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebuntingan dan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk pelayanan kegiatan ini terdapat di 13 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemeliharaan Kebun Percontohan Kopi Libtukom dan Kebun Percontohan Kelapa Sawit yang ada. Dengan adanya kegiatan ini kita tetap memelihara kebun percontohan yang ada melalui pemberian pupuk dan perlakuan sesuai dengan anjuran teknis. Selain itu nantinya hasil dari kegiatan ini adalah untuk menambah Pendapatan Daerah yang merupakan PAD dari Sektor Perkebunan.

3. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain

Tahun 2025 ini Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain juga mendukung Program Presiden Republik Indonesia yaitu mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun 2025 ini melalui dana Perubahan Mendahului dan APBD Perubahan 2025 telah menganggarkan berbagai ternak ke kelompok tani dan penguatan MBG (belanja ternak ayam dan pakan ayam petelur) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun pengadaan ternak yang diberikan kepada kelompok tani yang dianggarkan pada tahun 2025 ini yaitu :

No.	Komoditi	Penerima	Lokasi
I.	BANTUAN HIBAH		
1.	Kambing (10 ekor)	KT. Subur	Desa Teluk Pulai Raya Kec. Seberang Kota
2.	Ayam DOC (2 kotak)	KT. Campur Sari	Desa Pematang Lumut Kec. Betara
3.	Ayam DOC (1 kotak)	KT. Pulai Makmur	Desa Teluk Pulai Raya Kec. Seberang Kota
4.	Ayam DOC (1 kotak)	KT. Unggul Jaya	Desa Serdang Jaya Kec. Betara

5.	Ayam DOC (1 kotak)	KT. Mekar Harapan	Desa Mekar Tanjung Kec. Bram Itam
6.	Sapi (6 ekor)	KT. Berkat Usaha	Desa Taman Raja Kec. Tungkal Ulu
7.	Sapi (6 ekor)	KT. Kayu Merawan	Desa Kelagian Kec. Tebing Tinggi
8.	Sapi (6 ekor)	KT. Sido Mulyo	Desa Sungai Keruh Kec. Tebing Tinggi
9.	Sapi (sapi Penggemukan) (5 ekor)	KT. Sri Utomo III	Desa Mekar Jaya Kec. Betara
II.	BANTUAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN		
1.	Burung Puyuh Petelur (1.050 ekor)	KT. Berkah Bersama	Desa Sungai Kepayang Kec. Senyerang
2.	Burung Puyuh DOQ (2.000 ekor)	KT. Manggis Mandiri	Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi

Sedangkan ternak yang diadakan untuk mendukung Program MBG yaitu ternak ayam petelur sebanyak 1.000 ekor, pakan ternak dan obat-obatan serta kendaraan bermotor roda tiga sebanyak 1 unit. Selain itu pada tahun 2025 ini melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi melalui Program Dumisake juga mendapatkan bantuan hibah berupa ternak sapi dan kambing yang disebar ke beberapa kelompok tani yaitu :

1. KWT. Campur Sari Kecamatan Betara dengan jenis bantuan berupa ternak kambing sebanyak 25 ekor.
2. KT. Sri Rezeki 2 Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan dengan jenis bantuan berupa ternak sapi sebanyak 6 ekor.
3. KT. Argo Mukti Desa Sungai Muluk Kecamatan Muara Papalik dengan jenis bantuan berupa ternak sapi sebanyak 6 ekor.
4. KT. Sidodadi Desa Sungsang Kecamatan Senyerang dengan jenis bantuan berupa ternak sapi sebanyak 6 ekor.

4. Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk membantu petani dalam rangka peningkatan produksi komoditas perkebunan. Dari kegiatan ini diharapkan petani benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut untuk peningkatan kesejahteraan petani. Adapun bantuan hibah yang diberikan kepada kelompok tani berupa pupuk NPK tablet pada petani kelapa dalam sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Bantuan yang diberikan	Lokasi
1.	Alam Raya	600 kg	Desa Kuala Kahar Kec. Seberang Kota
2.	Al-Ikhsan Utama	200 kg	Desa Kuala Indah Kec. Kuala Betara
3.	Harapan Baru	300 kg	Desa Kuala Indah Kec. Kuala Betara
4.	Harapan Bersama	300 kg	Desa Muara Seberang Kec. Seberang Kota
5.	Harapan Jaya	300 kg	Desa Muara Seberang Kec. Seberang Kota
6.	Harapan Jaya	400 kg	Desa Teluk Sialang Kec. Tungkal Ilir
7.	Hidup Baru I	200 kg	Desa Muara Seberang Kec. Seberang Kota
8.	Manggo Raya	600 kg	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
9.	Mekar Baru	1.000 kg	Desa Kuala Kahar Kec. Seberang Kota
10.	Ojo Lali	600 kg	Desa Sungai Raya Kec. Pengabuan
11.	Sido Mulyo	800 kg	Desa Suak Labu Kec. Kuala Betara
12.	Suka Maju	600 kg	Desa Kuala Kahar Kec. Seberang Kota
13.	Sumber Makmur	700 kg	Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir
14.	Sungai Pinang	600 kg	Desa Sungai Raya Kec. Pengabuan
15.	Tunas Muda	1.000 kg	Desa Tungkal I Kec. Tungkal Ilir

Sedangkan untuk bantuan hibah pupuk organik pada tanaman kopi diberikan ke beberapa kelompok tani antara lain sebagaimana tercantum pada tabel dibawah berikut ini :

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Bantuan yang diberikan	Lokasi
1.	Arthomoro	80 botol	Desa Sungai Terap Kec. Betara
2.	Berkat Usaha	70 botol	Desa Sungai Terap Kec. Betara
3.	Haji Bangun	80 botol	Desa Sungai Terap Kec. Betara
4.	Karya Lestari II	50 botol	Desa Muntialo Kec. Betara
5.	Kemar Hijau Rimbun III	100 botol	Desa Bunga Tanjung Kec. Betara
6.	Khusnul Khotimah	50 botol	Desa Mandala Jaya Kec. Betara
7.	Lopon Jaya	50 botol	Desa Teluk Kulbi Kec. Betara
8.	Maju Jaya	50 botol	Desa Muntialo Kec. Betara
9.	Rumpun Mas	50 botol	Desa Teluk Kulbi Kec. Betara
10.	Sumber Utama	50 botol	Desa Teluk Kulbi Kec. Betara
11.	Usaha Mandiri	50 botol	Desa Mandala Jaya Kec. Betara
12.	Sri Utomo III	100 botol	Desa Mekar Jaya Kec. Betara

5. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar kelompok tani perkebunan dan peternakan yang ada bisa memanfaatkan bantuan hibah tersebut dan menjadi stimulan agar petani lebih giat lagi untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi serta pendapatan masyarakat /petani pekebun.

Adapun bantuan hibah yang diberikan kepada kelompok tani yaitu bantuan seng untuk lantai jemur pinang dengan kelompok tani penerima yaitu Kelompok Tani Tunas Haraoan II Desa Betara Kanan Kec. Kuala Betara dengan jumlah seng gelombang plastik sebanyak 15 paket/keping. Sedangkan untuk bantuan Hibah mesin Sedot Lumpur sebanyak 1 (satu) unit pada kelompok tani Kalpin Jaya Desa Teluk Pulau Raya Kecamatan Seberang Kota.

Selain itu Tahun 2025 ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui dana APBD Provinsi Jambi, mendapatkan bantuan berupa 1 unit bangunan solar dryer pada kelompok tani Suka Maju Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara.

6. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota ini dilaksanakan dengan maksud agar ternak yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bisa terlayani untuk pengobatan, pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan spesimen, vaksinasi dan eliminasi. Berikut tabel kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 :

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengobatan	3.000 ekor	3.000 ekor	100
2.	PKB	500 ekor	500 ekor	100
3.	Pemeriksaan Spesimen	200 ekor	200 ekor	100
4.	Vaksinasi	2.500 ekor	2.500 ekor	100
5.	Eliminasi	20 Ekor	20 ekor	100

7. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah

kabupaten/kota lain

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah pakan ternak yang berkualitas pada peternak yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pakan ternak yang berkualitas bisa dimiliki oleh peternak untuk meningkatkan produksi daging ternak khususnya ternak sapi dan juga sebagai stimulan kepada peternak bahwa pakan ternak berkualitas sangat menentukan produksi daging ternak dan kesehatan ternak. Adapun hijauan pakan ternak yang diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2025 ini yaitu Rumput Indigofera sebanyak 10 kg, Rumput Centro sebanyak 5 kg dan Rumput Odot sebanyak 240 kg.

8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani tahun anggaran 2025 menganggarkan bantuan kepada kelompok tani berupa pipa PVC untuk tata air mikro pada kebun kelapa dalam ataupun pinang yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun Anggaran 2025 ini diberikan bantuan tersebut berupa Pipa PVC sebanyak 17 batang kepada kelompok tani Karya Indah II di Desa Semau Kecamatan Bram Itam.

9. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan ini dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan produksi komoditi perkebunan. Melalui kegiatan ini dimaksudkan agar komoditi perkebunan tetap terlindungi dari serangan hama dan penyakit tanaman. Pengendalian OPT dilaksanakan secara kimia dan hayati. Pengendalian secara hayati dilaksanakan dengan pemberian jamur dan cendawan dengan melihat dan memonitor kondisi kebun yang akan dikendalikan. Secara kimia dilaksanakan melalui pemberian obat – obatan berupa insektisida dan herbisida yang sesuai dengan jenis komoditi yang terserang.

Pengendalian OPT yang dilakukan secara hayati pada tahun 2025 seluas 203

Ha dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengendalian Hama Kumbang Kelapa dan Hama Monyet di Kecamatan Tungkal Ilir seluas 10 Ha.
 2. Pengendalian Hama Kumbang Kelapa seluas 20 Ha di Kecamatan Pengabuan
 3. Pengendalian Hama Kumbang Kelapa seluas 20 Ha di Kecamatan Bram Itam.
 4. Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih dan Hama Kumbang Kelapa seluas 25 ha di Kecamatan Kuala Betara.
 5. Pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih pada tanaman pinang seluas 17 Ha di Kecamatan Bram Itam
 6. Pengendalian Hama Kumbang Kelapa pada tanaman kopi seluas 8 Ha di Kecamatan Betara.
 7. Pengendalian Penyakit JAP pada tanaman kopi seluas 16 Ha di Kecamatan Betara.
 8. Pengendalian Hama Kumbang Kelapa seluas 18,5 Ha di Kecamatan Bram Itam.
 9. Pengendalian Penyakit JAP dan Hama Kumbang Kelapa seluas 28 Ha di Kecamatan Kuala Betara.
 10. Pengendalian Hama Kumbang Kelapa seluas 15 Ha di Kecamatan Bram Itam.
 11. Pengendalian Penyakit JAP pada tanaman kelapa sawit seluas 13 Ha di Kecamatan Kuala Betara.
 12. Pengendalian Penyakit Busuk Akar pada tanaman pinang seluas 12,5 Ha di Kecamatan Bram Itam.
-
11. Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar bencana kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha perkebunan tidak terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui kegiatan pengendalian/pencegahan dan penanganan kebakaran lahan kebun, tim Dalkarlabun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan turun ke lapangan serta turun bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana, Kodim dan Polres jika bencana kebakaran terjadi. Namun selain itu Tim Dalkarlabun juga melakukan monitoring kelapangan atau ke wilayah yang rawan terjadi bencana kebakaran.

Selain itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat juga mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang berada di 3 (tiga) kecamatan yang juga membantu dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran lahan dan kebun. Adapun KTPA dimaksud adalah sebagai berikut yaitu :

- 1) KTPA Karya Lestari Desa Muntialo Kecamatan Betara
- 2) KTPA Mekar Sari Desa Dataran Pinang Kecamatan Kuala Betara
- 3) KTPA Harapan Jaya Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan

12. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar petani – petani yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya petani kelapa sawit untuk melegalkan usaha taninya. Dengan terdatanya petani pekebun kelapa sawit diharapkan kedepannya data kepemilikan kebun rakyat ini menjadi informasi pendukung dalam mengambil kebijakan. Realisasi penerbitan STDB Tahun 2025 sebanyak 265 pekebun dengan luasan 940,86 Ha atau 453 persil.

13. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit (DBH Kelapa Sawit) Tahun 2025 dan sisa dana DBH Sawit Tahun 2024. Dasar pelaksanaan kegiatan ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan PMK tersebut yaitu Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat, dan Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun.

Untuk kegiatan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat dari target seluas 650 Ha terealisasi 1.082,32 Ha atau sebanyak 792 persil dengan jumlah pekebun yang mendapatkan STDB sebanyak 597 pekebun. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun telah dilaksanakan dengan pendampingan sertifikasi pekebun pada KUD Sawit Kita Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh. Dengan adanya kegiatan yang sumber

dananya berasal dari dana DBH Sawit tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi pekebun kelapa sawit.

3.2.8. Analisis Terhadap Faktor Hambatan, Faktor Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, dapat dianalisis bahwa peningkatan kinerja pada sebagian besar indikator dipengaruhi oleh telah dilaksanakannya program dan kegiatan sesuai perencanaan, seperti pendampingan teknis kepada petani dan peternak, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut berdampak positif terhadap peningkatan produksi komoditas perkebunan dan pertumbuhan populasi ternak dibandingkan baseline Tahun 2024.

Namun demikian, belum tercapainya target kinerja pada beberapa indikator disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, ketergantungan pada kondisi alam dan iklim, serta fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi minat dan kemampuan petani serta peternak dalam meningkatkan produksi. Pada sektor perkebunan, faktor usia tanaman yang tidak produktif, serangan hama dan penyakit tanaman, serta keterbatasan penerapan teknologi budidaya turut menjadi penyebab rendahnya capaian terhadap target. Sementara pada sektor peternakan, tantangan berupa penyakit hewan, ketersediaan pakan, serta rendahnya kualitas bibit ternak memengaruhi laju pertumbuhan populasi.

Pada indikator nilai AKIP OPD dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peningkatan kinerja dipengaruhi oleh adanya perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan koordinasi internal, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan. Namun, belum optimalnya capaian target disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum meratanya pemahaman terhadap implementasi SAKIP, serta masih adanya proses pelayanan yang belum sepenuhnya efisien dan terdigitalisasi.

Dapat kami uraikan beberapa faktor keberhasilan (*Success Factors*) dari capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen yang Efektif: Konsistensi

kenaikan Nilai AKIP yang puncaknya mencapai 100,13% di tahun 2025 membuktikan adanya komitmen kuat dalam perbaikan tata kelola internal, perencanaan target yang lebih realistis, dan pengawasan program yang berjalan optimal.

2. Optimalisasi Komoditas Unggulan Lokal: Keberhasilan komoditi Kopi (100,80%) dan Pinang (100,52%) dalam melampaui target menunjukkan ketepatan pembinaan petani di lapangan. Selain itu, sektor Kelapa Dalam berhasil membuktikan dirinya sebagai komoditas jangka panjang dengan menyumbang kontribusi nyata sebesar 1,93% terhadap Target Strategis Nasional.
3. Stabilisasi Kepatuhan Target Sektor Peternakan: Sinkronisasi data (*cleansing data*) yang dilakukan pada Renstra baru berhasil membuat perencanaan target populasi ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Unggas) menjadi jauh lebih terukur, sehingga realisasi di lapangan mampu bergerak sangat efisien di angka 98%–99%.

Selain faktor keberhasilan sebagaimana yang diuraikan diatas tentunya terdapat beberapa faktor hambatan (*Obstacles & Challenges*) dalam pencapaian target kinerja. Adapun faktor hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Masalah Struktural dan Penurunan Produktivitas Karet: Komoditi Karet mengalami hambatan serius berupa penurunan produksi secara terus-menerus sejak 2021. Hal ini diduga kuat akibat masalah hulu seperti penuaan tanaman (*senesensi*), minimnya peremajaan lahan, serta fluktuasi harga jual yang membuat petani beralih komoditas.
2. Kesenjangan Kualitas Pelayanan Publik (IKM/SKM): Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/SKM) menjadi satu-satunya indikator yang gagal memenuhi target tahun 2025 (hanya tercapai 96,20%). Hambatan ini dipicu oleh belum optimalnya digitalisasi pelayanan, respons terhadap keluhan masyarakat yang lambat, atau adanya ketidakselarasan antara program kerja instansi dengan ekspektasi riil masyarakat di lapangan.
3. Skala Kontribusi Nasional yang Terbatas: Pada beberapa sektor seperti

Kopi, meskipun secara lokal sukses 100%, kontribusinya terhadap agregat nasional baru menyentuh 0,15%. Hambatannya terletak pada keterbatasan luas lahan budidaya dan belum masifnya hilirisasi produk di tingkat daerah.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, alternatif solusi strategis yang dilakukan antara lain :

1. Revitalisasi Sektor Hulu Karet: Menyusun program bantuan intensif bagi petani karet, meliputi pembagian bibit unggul, sosialisasi teknik penyiapan yang modern, serta mendorong program peremajaan lahan (*replanting*) massal untuk memutus tren penurunan produksi.
2. Akselerasi Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi IKM: Melakukan evaluasi berkala terhadap unit layanan, mempercepat digitalisasi sistem pelayanan agar lebih transparan dan cepat, serta membuka kanal aduan masyarakat yang responsif guna mendorong kembali indeks kepuasan masyarakat menuju target berikutnya.
3. Penguatan Kemitraan dan Hilirisasi Produk Kelapa & Kopi: Memanfaatkan potensi besar Kelapa Dalam (kontribusi 1,93% nasional) dengan membangun industri pengolahan turunan kelapa (seperti sabut, minyak kelapa murni, atau arang batok) di tingkat daerah agar nilai ekonominya meningkat. Untuk kopi, perlu perluasan kemitraan dengan sektor swasta guna memperluas jaringan pasar di luar daerah.

3.2.9. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 dianalisis dengan membandingkan capaian kinerja yang dihasilkan terhadap pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Secara umum, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Dinas Perkebunan dan Peternakan mampu menghasilkan capaian kinerja yang menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mencerminkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari aspek anggaran, sebagian besar alokasi belanja difokuskan pada

program prioritas yang mendukung peningkatan produksi komoditas perkebunan dan populasi ternak. Meskipun realisasi kinerja belum sepenuhnya mencapai target Renstra Tahun 2025, capaian yang meningkat dibandingkan baseline menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan telah mampu menghasilkan output yang sebanding. Hal ini menandakan bahwa penggunaan anggaran relatif efisien, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar capaian kinerja dapat lebih optimal.

Pada aspek sumber daya manusia, keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur dioptimalkan melalui pengaturan tugas yang proporsional, pemanfaatan tenaga penyuluh secara lintas program, serta peningkatan koordinasi antarbidang. Optimalisasi peran aparatur ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dan menghasilkan peningkatan kinerja tanpa penambahan sumber daya manusia yang signifikan, sehingga mendukung efisiensi pelaksanaan program.

Selanjutnya, dari sisi sarana dan prasarana, efisiensi dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia secara maksimal, penggunaan bersama sarana pendukung, serta penjadwalan kegiatan yang lebih terkoordinasi. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas dan sebagian sarana memerlukan pembaruan, hal tersebut tidak secara signifikan menghambat pencapaian output kegiatan.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 berada pada kategori cukup baik, ditunjukkan oleh peningkatan capaian kinerja yang dapat diraih dengan sumber daya yang terbatas. Ke depan, efisiensi akan terus ditingkatkan melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan program secara lebih efektif dan efisien.

3.2.10. Realisasi Anggaran

3.2.10.1. Realisasi Pendapatan dibandingkan dengan Target Pendapatan Tahun 2025

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga termasuk OPD yang menyumbangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari Pengelolaan Komoditi Perkebunan dan Peternakan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.2.10.1. : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp.) Tahun 2025	Realisasi (Rp.) Tahun 2024	%
A.	Pendapatan Asli Daerah	69.000.000.-	59.560.880.-	86,32
	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	69.000.000.-	59.560.880.-	104.30
1	Hasil Penjualan Tanaman	49.000.000.-	57.360.880.-	117.06
2	Hasil Penjualan Hewan	20.000.000.-	2.200.000.-	11,00
Jumlah		69.000.000.-	59.560.880.-	86.32

Sumber data : Laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan belanja Disbunak tahun 2025

3.2.10.2. Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Untuk Tahun 2025 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 11.920.116.121.- (88.39%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 13.485.327.813.- dan dapat dilihat pada uraian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.10.2 : Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2025
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat

No	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA DAERAH	13.485.327.813.-	11.920.116.121.-	88.39
I.	Belanja Operasi	11.912.973.913.-	10.493.573.572.-	88.09
1.1	Belanja Pegawai	4.718.363.778.-	4.384.852.826.-	92.93
1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.402.310.135.-	5.320.502.126.-	83.10

1.3	Belanja Hibah	792.300.000.-	788.218.620.-	99.48
II.	Belanja Modal	1.572.353.900.-	1.426.542.549.-	90.73
	JUMLAH	13.485.327.813.-	11.920.116.121.-	88.39

Sumber data : Laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan belanja Disbunak tahun 2025

Untuk rincian belanja per kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana terinci dibawah ini :

Tabel 3.2.10.2 : Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.279.842.534.-	6.670.449.964.-	91.63	96.00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.337.000.-	168.815.800.-	98.52	98.80
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.135.100.-	11.975.000.-	91,17	98,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.202.000.-	156.840.000.-	99,18	99,60
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.937.773.778.-	4.563.002.826.-	87,07	92,05
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.718.363.778.-	4.384.852.826.-	92.93	96.09
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.410.000.-	178.150.000.-	81.20	88.00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.000.000.-	103.021.875.-	99.06	100
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.000.000.-	103.021.875.-	99.06	100
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.571.756.-	339.039.451.-	82.27	98.22
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.058.000.-	6.057.895.-	99.98	100
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.934.756.-	57.831.000.-	83,89	95.33

3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.550.000.-	29.520.000.-	99,89	100
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.750.000.-	32.335.000.-	79,34	100
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000.-	2.780.000.-	38,61	96,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.079.000.-	210.515.556.-	91,90	98,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.600.000.-	150.449.400.-	96,89	96,00
3.27.01.2.07.01	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	89.100.000.-	88.788.900.-	99,65	93,33
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.500.000.-	61.660.500.-	94,14	98,67
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.850.000.-	583.649.651.-	80,48	90,26
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.750.000.-	6.856.200.-	78,36	90,50
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.700.000.-	58.548.451.-	67,53	82,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.400.000.-	518.245.000.-	95,55	98,29
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.710.000.-	762.470.961.-	80,61	97,03
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.706.000.-	120.132.660.-	67,98	97,40
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.544.000.-	105.952.390.-	62,13	93,20

3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.810.000.-	23.266.000.-	93,78	97,50
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	520.650.000.-	513.119.911.-	98,55	100
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.367.301.978.-	3.162.297.906.-	93,91	93,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	319.940.000.-	312.205.550.-	97,58	84,57
3.27.02.2.01.01	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	319.940.000.-	312.205.550.-	97,58	84,57
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	588.503.400.-	565.936.406.-	95,81	91,93
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	73.380.000.-	68.756.875.-	93,70	94,17
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	298.991.400.-	283.125.070.-	94,69	83,71
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	216.132.000.-	214.054.461.-	99,04	97,92
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	2.458.858.578.-	2.284.155.950.-	95,61	98,73
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.443.958.578.-	2.269.500.950.-	92,86	97,45
3.27.02.2.06.02	Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	14.900.000.-	14.655.000.-	98,36	100
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.674.877.200.-	1.082.522.722.-	64,63	88,00
3.27.03.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.505.977.200.-	927.509.652.-	61,59	88,00

3.27.03.01.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.505.977.200.-	927.509.652.-	61,59	88,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.178.663.948.-	933.000.000.-	98,96	100
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	39.500.000.-	39.104.070.-	99,00	100
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	69.050.000.-	68.309.000.-	98,93	100
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.350.000.-	47.600.000.-	78,87	64,33
	Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	60.350.000.-	47.600.000.-	78,87	64,33
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	561.342.236.-	474.186.044.-	84,47	81,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	539.213.236.-	464.344.424.-	86,12	95,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam satu Kab/Kota	539.213.236.-	464.344.424.-	86,12	95,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	11.600.000.-	4.800.000.-	41,38	73,33
3.27.04.2.02.01	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk dan media pembawa penyakit hewan (HPM)	11.600.000.-	4.800.000.-	41,38	73,33
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.529.000.-	5.041.620.-	47,88	73,33
3.27.04.2.03.01	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	10.529.000.-	5.041.620.-	47,88	73,33
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	201.871.565.-	172.199.985.-	85,30	96,68
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	201.871.565.-	172.199.985.-	85,30	96,68

3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	62.446.565.-	57.034.985.-	91,33	99,64
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	139.425.000.-	115.065.000.-	82,60	93,71
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	149.845.000.-	116.065.000.-	77,46	85,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.845.000.-	116.065.000.-	77,46	85,00
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	149.845.000.-	116.065.000.-	77,46	85,00
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	250.247.300.-	242.394.500.-	97,59	93,07
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	250.247.300.-	242.394.500.-	97,59	93,07
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	162.999.800.-	155.147.000.-	95,18	86,14
3.27.07.2.01.03	Penyediaan Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	87.247.500.-	87.247.500.-	100	100
	JUMLAH	13.485.327.813.-	11.920.116.121.-	88,39	90,28

Keterangan : OUTCOME dan OUTPUT telah menyesuaikan dengan APBD-P TA 2025 OPD,

SUMBER DATA LPPK BULAN DESEMBER 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Keuangan sebesar 88,39% (Delapan puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen) dan Realisasi fisik sebesar 90,28% (Sembilan puluh koma dua puluh delapan persen), rincian anggaran belanja tahun 2025 tersebut semuanya telah tertuang didalam APBD-PTA 2025.

3.2.10.3. Efektivitas Anggaran

Keputusan Mendagri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 mendefinisikan efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real Dinas.

Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan yang terlihat dalam tabel tingkat efektivitas dihitung pada tahun 2024. Tingkat Efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

Tingkat Efektivitas Anggaran	
A	Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti <i>Sangat Efektif</i>
B	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% sampai 100% berarti <i>Efektif</i>
C	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80% sampai 90% berarti <i>Cukup Efektif</i>
D	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% sampai 80% berarti <i>Kurang Efektif</i>
E	Hasil perbandingan tingkat pencapaian kurang 60% berarti <i>Tidak Efektif</i>

Berdasarkan tabel 3.2.7.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat diatas, maka Tingkat *efektivitas anggaran* belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	%	Skor (Penilaian)
1	2	3 = (2/1)	4
Rp. 13.485.327.813.-	Rp. 11.920.116.121.-	88.39	Cukup Efektif

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Tingkat *Efektivitas Anggaran* Belanja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "Cukup Efektif". Adapun berbagai kendala dalam pencapaian Tingkat *efektivitas anggaran* belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan

Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan akibat proses administrasi, seperti penyesuaian jadwal, serta keterlambatan pengadaan barang dan jasa, sehingga realisasi anggaran tidak dapat terserap secara optimal

2. Keterbatasan Kapasitas Pelaksana Kegiatan

Terbatasnya sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis, berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang bersifat teknis di lapangan.

3. Kondisi Geografis dan Cuaca

Faktor geografis wilayah serta kondisi cuaca yang kurang mendukung pada waktu tertentu menghambat pelaksanaan kegiatan perkebunan dan peternakan, sehingga memengaruhi kecepatan dan capaian realisasi anggaran.

4. Efisiensi Belanja dan Penghematan Anggaran.

Terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, baik karena penghematan belanja maupun penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, yang menyebabkan sisa anggaran tidak seluruhnya terserap meskipun

output kegiatan telah tercapai.

3.2.10.4. Analisis Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 mengelompokkan Efisiensi sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Anggaran	
A	Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti <i>Tidak Efisien</i>
B	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% sampai 100% <i>Kurang Efisien</i>
C	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80% sampai 90% berarti <i>Cukup Efisien</i>
D	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% sampai 80% berarti <i>Efisien</i>
E	Hasil perbandingan tingkat pencapaian kurang 60% berarti <i>Sangat Efisien</i>

Tingkat efesiensi anggaran belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.279.842.534	6.670.449.964	609.392.570	8,37
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.367.301.978	3.162.297.906	205.004.072	6,09
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.674.877.200	1.082.522.722	592.354.478	35,37
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	561.342.236	474.186.044	87.156.192	15,53
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	201.871.565	172.199.985	29.671.580	14,7
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	149.845.000	116.065.000	33.780.000	22,54
7	Program Penyuluhan Pertanian	250.247.300	242.394.500	7.852.800	2,41
Jumlah		13.485.327.813	11.920.116.121	1.565.211.692	11,61

Dari tabel diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan anggaran pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Dari total pagu anggaran (Target) yang dialokasikan sebesar Rp13.485.327.813, total Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp11.920.116.121. Hal ini menghasilkan sisa anggaran atau nilai Efisiensi riil sebesar Rp1.565.211.692, atau setara dengan tingkat penghematan akumulatif sebesar 11,61%. Hal ini dapat kita lihat pada analisis masing-masing program kerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Target: Rp7.279.842.534 | Realisasi: sebesar Rp6.670.449.964.-
- Analisisnya bahwa program ini menggunakan porsi anggaran terbesar dari seluruh belanja dinas. Tingkat efisiensi yang dicapai adalah sebesar 8,37% (penghematan sebesar Rp609.392.570). Mengingat perannya sebagai penunjang birokrasi, penghematan operasional ini tergolong signifikan tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Target: Rp3.367.301.978 | Realisasi: Rp3.162.297.906.-
- Analisisnya bahwa program ini dengan alokasi terbesar kedua. Program ini berjalan sangat optimal dengan tingkat penyerapan yang tinggi, menyisakan nilai efisiensi sebesar 6,09% atau setara dengan Rp205.004.072.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Target: Rp1.674.877.200 | Realisasi: Rp1.082.522.722.-
- Analisisnya bahwa program ini mencatatkan persentase efisiensi tertinggi di antara semua program kerja, yaitu sebesar 35,37% dengan sisa anggaran mencapai Rp592.354.478. Tingginya angka efisiensi ini memerlukan evaluasi internal untuk memastikan apakah penghematan berasal dari efisiensi harga pengadaan kontrak fisik atau karena adanya penundaan pengerjaan proyek prasarana tertentu di lapangan.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Target: Rp561.342.236 | Realisasi: Rp474.186.044.-
- Analisisnya bahwa program ini berhasil membukukan efisiensi dua digit sebesar 15,53% atau menghemat anggaran daerah sebesar Rp. 87.156.192.-

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Target: Rp201.871.565 | Realisasi: Rp172.199.985
- Analisisnya bahwa mengingat sifat pendanaan bencana yang situasional, program ini mencatatkan efisiensi yang aman dan ideal sebesar 14,70% (menghemat Rp29.671.580).

6. Program Perizinan Usaha Pertanian

- Target: Rp.149.845.000 | Realisasi: Rp.116.065.000
- Analisisnya dengan pagu operasional terkecil kedua, program perizinan mampu menghemat anggaran belanja hingga 22,54% atau setara Rp33.780.000. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi biaya administrasi publik atau digitalisasi sistem layanan perizinan.

7. Program Penyuluhan Pertanian

- Target: Rp.250.247.300 | Realisasi: Rp.242.394.500-
- Analisisnya dengan program kerja dengan penyerapan paling maksimal dan tingkat efisiensi paling rendah, yakni hanya sebesar 2,41% (sisa Rp7.852.800). Rendahnya angka efisiensi menunjukkan anggaran penyuluhan di lapangan terserap hampir sepenuhnya secara operasional untuk menyentuh para petani/kelompok tani.

Selanjutnya dapat kami sampaikan juga tingkat efisiensi anggaran dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran dengan total anggaran/belanja tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat

Realisasi Anggaran	Total Anggaran/Belanja	%	Skor (Penilaian)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3 = 1/2</i>	<i>4</i>
Rp. 11.920.116.121.-	Rp. 13.485.327.813.-	88,39	Cukup Efisien

Dari realisasi anggaran APBD pada tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun anggaran 2025 sebesar 90,28 % dengan realisasi anggaran sebesar 88.39 % artinya bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa mengefisiensikan penggunaan dana anggaran tahun 2025 sebesar 11,61 % dengan tingkat efisiensi anggaran Cukup Efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan berdasarkan PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2025, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran dan Indikator Kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Berdasarkan pagu indikatif DPA Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 88,39% dari anggaran indikatif yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama) yang disajikan pada tabel di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil masing-masing dari ke 2 (dua) indikator kinerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 yaitu :

- Meningkatnya produksi komoditi perkebunan sebesar 99,45%. Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT BAIK. Namun kedepannya perlu dipertahankan dan dilakukan upaya untuk lebih baik lagi.

2. Sasaran 2 yaitu :

- Meningkatnya populasi ternak diatas 90% (99,25%). Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT BAIK. Namun kedepannya perlu dipertahankan dan dilakukan upaya yang lebih baik lagi.

Sedangkan untuk Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini sebesar 88,39 % atau sebesar Rp. 11.920.116.121,- dari total anggaran sebesar Rp. 13.485.327.813,- .

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen Laporan Kinerja.
3. Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya

Kuala Tungkal, Januari 2026

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. RIDUWAN.

Pembina Tk. I

NIP. 19740306 200012 1 001

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PERKEBUNAN TAHUN 2025

CPCL Penerima Bantuan Pupuk



Penilai Fisik Kebun



Hibah Pupuk



Pengambilan Titik Koodinat



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PETERNAKAN TAHUN 2025

Distribusi Bantuan Ternak dan Pelatihan Ternak 2025





Kandang Demplot Ternak Ayam (MBG) 2025





Pelayanan Kesehatan Hewan dan IB (Inseminasi Buatan) 2025





Pembinaan Kelompok Ternak 2025





Pengecekan Hewan Qurban 2025





Pertemuan Pelaku Usaha Ternak & Petugas 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2025



Kegiatan pembangunan Prasarana Pertanian (pengadaan pipa paralon)



Pengadaan Mesin



STDB



STDB



Lantai Jemur



Lantai Jemur

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TAHUN 2025



Pelatihan Budidaya Komoditi Perkebunan di Kelompok Tani Haji Bangun Desa Sungai Terap Kec. Betara (Peninjauan Lapangan)



Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan VCO di KWT Karya Maju Desa Sungai Baung Kec. Pengabuan



Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan di Kelompok Wanita Tani Serdang Serja Akur Desa Serdang Jaya Kec. Betara



Pelatihan Penguatan Kelembagaan di Kelompok Tani Gapoktan Cahaya Murni Desa Tanjung Senjulung Kec. Bram Itam



Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi di Kelompok Tani Sumber Makmur Kel. Tkl II Kec. Tkl Ilir